

Pendidikan Demokrasi dalam Kurikulum Bermuatan Ideologi pada Institusi Pendidikan Islam

Umar Samsudin^{1✉}

STAI Binamadani Tangerang¹

Email : umarsam72@yahoo.com¹

Received: 2020-09-17; Accepted: 2020-09-21; Published: 2020-09-21

ABSTRACT

Education as a major factor in the development of people's culture is often used by various thoughts and ideologies to spread their understanding and thinking patterns. It is not strange if a thought dominates a certain educational institution or system. Among the ideas that influence and even determine the goals and learning methods of an educational system are ideology and religion. The relationship between education and ideology is rooted in the history of education. The domination of an ideology is not only obtained through revolution or violence carried out by state institutions, but also through other institutions, such as religious institutions, education, mass media and the family. And it becomes clear that the nature of education is very dependent on the perspective of the ideology it adopts.

Keywords: Democracy Education; Ideology-filled Curriculum; Islamic Educational Institutions

ABSTRAK

Pendidikan sebagai faktor utama perkembangan budaya masyarakat, seringkali dimanfaatkan oleh berbagai pemikiran dan ideologi untuk menyebarkan pemahaman dan pola pikirnya. Sudah tidak asing lagi jika suatu pemikiran mendominasi lembaga atau sistem pendidikan tertentu. Di antara pemikiran-pemikiran yang banyak memberikan pengaruh dan bahkan menentukan tujuan dan metode pembelajaran suatu sistem pendidikan adalah ideologi dan agama. Hubungan antara pendidikan dan ideologi sudah mengakar dalam perjalanan sejarah dunia pendidikan. Dominasi suatu ideologi tidak hanya didapatkan melalui revolusi atau kekerasan yang dilakukan oleh institusi-institusi negara, tetapi juga dapat melalui institusi-institusi lain, seperti institusi agama, pendidikan, media massa dan keluarga. Dan menjadi jelaslah bahwa hakikat

262 | Pendidikan Demokrasi dalam Kurikulum Bermuatan Ideologi pada
Institusi Pendidikan Islam (261 - 277)

Available at : <https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/37>

pendidikan sangat tergantung dari kacamata ideologi yang dianutnya.

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi; Kurikulum Bermuatan Ideologi; Institusi
Pendidikan Islam

Copyright © 2020 Eduprof : Islamic Education Journal

Journal Email : eduprof.bbc@gmail.com / jurnaleduprof.bungabangsacirebon.ac.id

Eduprof: Islamic Education Journal

Volume 2 Nomor 2, September 2020 | P-ISSN : [2723-2034](https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i2.37) | E-ISSN: [2723-2034](https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i2.37)

DOI: <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i2.37>

PENDAHULUAN

Pembenahan kurikulum secara nasional dalam pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar. Globalisasi yang kian bergulir, memaksa seluruh elemen masyarakat untuk menyesuaikan diri. Pendidikan yang sarat dengan tarik ulur kepentingan politik, ekonomi dan ideology, tidak diragukan lagi, juga menghadapi problematika yang tidak jauh berbeda. Sejatinya, apa yang ditakutkan kebanyakan masyarakat, salah satunya, adalah degradasi moral yang kian mempertanyakan keberadaan pendidikan sebagai benteng kebobrokan. Korupsi, kenakalan remaja, pelecehan seksual, kian marak mencorengi wajah dunia pendidikan di Indonesia, bahkan kasus pelecehan seksual yang sebagiannya melibatkan oknum pegawai pendidikan menjadi sorotan dunia internasional.

Pendidikan Agama disinyalir memberikan efek besar terhadap keberagaman seseorang, termasuk itu apakah pola keberagaman yang inklusif maupun yang eksklusif. Keberadaan ideologi keagamaan yang dikembangkan masing masing institusi juga turut menyumbang poin jurang perbedaan pemahaman keagamaan. Upaya pemerintah untuk memberlakukan pendidikan multikultural ternyata masih terbentur pada masalah inti di internal institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah benar perbedaan itu yang lambat laun mengikis nilai-nilai pluralitas? Apakah benar kondisi demikian pada institusi pendidikan yang ada di Indonesia? Lalu, apakah sebenarnya yg terjadi pada pendidikan di Indonesia saat ini? Adakah hubungannya dengan kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara strategis, kurikulum dianggap seperti sebuah alat untuk

menggulirkan misi tertentu. Freire menegaskan bahwa di dalam sebuah kurikulum terjadi hegemoni kultural dan ideologis melalui pengetahuan, norma, nilai-nilai, dan kultur yang diterima seorang siswa¹. Selaras dengan itu, Freire juga menyebutkan dalam *Pedagogy of the Oppressed* bahwa pada dasarnya pendidikan selalu bersinggungan dengan kekuasaan². Secara sadar dapat dipahami bahwa makna dari pernyataan Freire tersebut menunjukkan realita sebenarnya yang terjadi dalam dunia pendidikan, bahkan dalam dunia pendidikan Islam sekalipun.

Setidaknya data faktual yang menunjukkan hal tersebut dapat diidentifikasi dari pengalaman sejarah, yakni sebuah contoh peranan madrasah pada masa Islam Klasik, di mana lembaga pendidikan menjadi bagian dari konstelasi politik yang berfungsi mengokohkan kekuasaan politik para penguasa saat itu. Madrasah Nizamiyah Baghdad merupakan salah satu contoh ikon sekolah Islam yang kental akan relasi edu-politik tersebut.³ Madrasah sebagai lembaga baru yang didirikan Nizam al-Mulk ini dirancang sebagai sebuah lembaga negara untuk meningkatkan indoktrinasi agama berdasarkan agama Islam Sunni dan indoktrinasi politik bergaya Turki dan Persia⁴. Akan tetapi, Makdisi berkesimpulan lain ialah bahwa Madrasah Nizamiyah tidak dicampuri oleh negara karena berkaitan dengan pilihan terhadap salah satu mazhab dari mazhab Sunni yang berbeda dari mazhab yang dianut raja Saljuk⁵.

Dengan kata lain, praktik pendidikan memiliki kecenderungan untuk digunakan sebagai media dalam memenuhi kepentingan ekonomi, politik dan ideologi; atau dalam bahasa Apple sekolah sebagai mekanisme kontrol

¹ Peter McLaren and P Leonard, 'Critical Literacy, Resistance and the Politics of Memory', *Paulo Freire: A Critical Encounter*, 1993, 47–89.

² Paulo Freire, 'Pedagogy of the Oppressed (Revised)', *New York: Continuum*, 1996.

³ Abdurrasyid, 'Madrasah Nizamiyah Studi tentang Hubungan Pendidikan dan Politik' (Tesis Magister Ilmu Agama Islam, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994).

⁴ M Romly, 'SEJARAH MADRASAH DAN PERKEMBANGANNYA', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.01 (2012).

⁵ C E Bosworth, 'The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. By George Makdisi. Pp. Xiv, 377. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.£ 20.', *Journal of the Royal Asiatic Society*, 115.2 (1983), 304–5.

sosial⁶. Hegemoni kepentingan-kepentingan tersembunyi tersebut memang tidak terasa atau tidak disadari, karena memang bersembunyi dibalik pengetahuan yang dipelajari siswa, juga dibalik norma, nilai-nilai dan kultur yang dipraktikkan di sekolah atau kampus. Fenomena ini dapat disebut sebagai praktik hegemoni kepentingan atau ideologisasi pengetahuan, atau dalam kajian kurikulum disebut sebagai kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*)⁷.

Terkait dengan ideologi dan peran sebuah identitas, Reza Arjmand menyimpulkan dalam bukunya, *Education and Empowerment of the Religious Elite in Iran*,⁸ bahwa hegemoni ideologis melalui pendidikan pasca revolusi di Iran telah membentuk suatu kekuatan baru pada elit agama (ulama) di Iran. Setidaknya telah jelas gambaran tentang korespondensi antara ideologi, budaya dan agama asli Islam Syiah yang dominan di Iran menjadikannya sebagai suatu kekuatan hegemonis. Melalui buku-buku dan kode etik dalam hidden curriculum-nya, sistem pendidikan Iran telah berorientasi pada Syiah-oriented yang selanjutnya menjadi bagian dari proses politisasi agama dalam suatu lembaga pendidikan yang diterapkan pada generasi-generasi muda Iran. Bahkan, karena ketatnya peraturan, didirikan sebuah lembaga/organisasi khusus oleh Kementerian Pendidikan Iran yang mengontrol dan mengatur isi buku kurikulum termasuk muatan-muatan ideologis dan trend islamisasi yang diberlakukan di dalamnya⁹. Upaya-upaya tersebut adalah merupakan bagian dari tujuan pendidikan yang telah menyatu dengan tujuan politik negaranya sebagai penganut Syiah terbesar di dunia, di samping sebagai bagian dari agenda pembentukan identitas politik Syiah bagi para generasinya¹⁰.

⁶ Michael W Apple, 'The Politics of Official Knowledge: Does a National Curriculum Make Sense?', *Discourse*, 14.1 (1993), 1–16.

⁷ Michael W Apple, 'Apple, Michael W.," On Analyzing New Hegemonic Relations: An Interview," Pp. 173-202 in Michael W. Apple. *Ideology and Curriculum*, New York: RoutledgeFalmer, 2004.', 2004.

⁸ Reza Arjmand, 'Education and Empowerment of Religious Elite in Iran', *Educational Strategies among Muslims in the Context of Globalization: Some National Case Studies*, 2004, 285.

⁹ Golnar Mehran, 'Ideology and Education in the Islamic Republic of Iran', *Compare*, 20.1 (1990), 53–65.

¹⁰ Golnar Mehran, 'Religious Education and Identity Formation in Iranian Schools',

Deskripsi relasi politik dan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, melalui pengalaman sejarah Nizamiyah yang Sunni dan Iran yang Syiah, merupakan sebuah kajian penting yang perlu dikritisi terkait keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki realitas kompleks. Dilihat dari segi kelembagaan, di samping pesantren, sekolah, begitu juga madrasah dalam perspektif ideologi keagamaan, sejak awal pertumbuhannya, mereka menjadi tempat untuk memelihara dan mendesiminasikan ideologi keagamaan tertentu. Kompleksitas itu bahkan belum termasuk kategori pedesaan-perkotaan, kapasitas pelajar dan sebagainya.

Analisis mengenai kondisi serupa yang terjadi pada pendidikan Islam di Indonesia setidaknya dapat dilihat dalam disertasi Arief Subhan, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia memiliki akar dalam khazanah kelembagaan pendidikan Islam di masa lalu, yaitu maktab, kuttab, madrasah dan sebagainya. Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya baik akal maupun hati; rohani dan jasmani; akhlak dan keterampilan¹¹. Salah satunya madrasah, lembaga ini dianggap berfungsi sebagai media untuk menjaga dan menyebarkan ideologi keagamaan tertentu¹². Fungsi ini ternyata terus berlanjut dalam tradisi kelembagaan pendidikan Islam. Hal ini sangat relevan dengan pernyataan Malik Fadjar dalam “Madrasah dan Tantangan Modernitas”, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan Islam masih dalam posisi sebagai “cagar budaya” untuk mempertahankan pemahaman keagamaan tertentu¹³. Menurut penulis, dengan kesamaan konklusi dari beberapa tanggapan di atas, menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara ideologi keagamaan dan lembaga pendidikan terkait masalah perpolitikan.

in *Conference on Constructs of Inclusion and Exclusion: Religion and Identity-Formation in Middle Eastern School Curricula*, November, 2003, pp. 14–15.

¹¹ Affandi Mochtar, ‘Pola Dan Model Perubahan Pesantren’, *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1.1 (2019), 87–94.

¹² Robert D McChesney, ‘Marshall GS Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. In Three Volumes: The Classical Age of Islam; The Expansion of Islam in the Middle Periods; The Gunpowder Empires and Modern Times (Chicago: University of Chicago Press, 1974). \$20.00 per Volume.’, *Review of Middle East Studies*, 9.3 (1975), 45–47.

¹³ A Malik Fadjar, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas* (Diterbitkan atas kerja sama Yasmin [dan] Penerbit Mizan, 1998).

Harus diakui bahwa dalam konteks kelembagaan, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mengindikasikan kecenderungan sebuah dinamika institusi pendidikan yang ternyata tidak bersifat monolitik, bahkan sangat kompleks. Kompleksitas ini tidak hanya terjadi dalam proses dan tingkat modernisasi yang bergulir, tetapi juga dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan substansi pembelajarannya. Kompleksitas ini pada satu sisi adalah khazanah/kekayaan, namun di sisi lain ada sebuah mobilitas politik yang sangat mungkin menimbulkan konflik jika proses pendidikan hanya mengedepankan indoktrinasi¹⁴. Yang lebih dikhawatirkan adalah jika lembaga pendidikan Islam terkungkung dalam suatu bentuk *schizoid pedagogy*¹⁵ yang berjalan sendiri-sendiri oleh sebab problem identitas.

Sebagai studi komparatif, contoh bukti nyata untuk melihat hubungan ideologi dengan aktivitas pendidikan yang paling mudah diamati adalah pesantren. Menurut Zul Asyri LA dalam disertasinya, “Nahdlatul Ulama: Studi tentang Fahaman Keagamaan dan Pelestariannya melalui Lembaga Pendidikan Pesantren”¹⁶, pesantren, yang merupakan ‘saudara kembar’ NU sekaligus sebagai lokomotif penghasil intelektual-intelektual NU, merupakan tempat khusus bagi NU untuk melestarikan fahaman keagamaan seperti Asy’ariyah. Adapun kurikulum dan materi pelajaran Fiqih di pesantren mengajarkan paham mazhab Syafi’i dan generasi ulama para pendukungnya. Misalnya, dalam kasus pesantren Tebu Ireng, di mana dalam hasil penelitiannya tidak ditemukan suatu upaya untuk mereformulasikan fahaman keagamaan yang dianutnya. Mereka tetap terikat oleh tradisi keilmuan masa lampau, yaitu mengkaji kitab-kitab yang bermazhab Syafi’i dan berfahaman Asy’ariyah, meskipun secara akademis pembaruan dalam hal organisasi, metode pengajaran dan aktivitas dalam masyarakat juga tetap dilakukan. Agaknya, upaya-upaya seperti mempertahankan tradisi keilmuan pesantren tetap mendapatkan tempat penting pada lembaga ini.

Menghadapi kondisi ini, tugas pedagogi kritis dalam fenomena

¹⁴ Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (RajaGrafindo Persada, 2005).

¹⁵ Basil Bernstein, *Pedagogy, Symbolic Control, and Identity: Theory, Research, Critique* (Rowman & Littlefield, 2000), v.

¹⁶ Zul Asyri La, ‘Nahdlatul Ulama: Studi Tentang Fahaman Keagamaan Dan Kelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren’.

tersebut adalah menggugah nalar kritis dari pelaku pendidikan (siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan lainnya) untuk menyadari bahwa telah terjadi hegemoni dan ideologisasi dalam pendidikan. Menurut penulis, dalam kasus ini ada peran politik yang seyogyanya tidak meracak¹⁷ di atas teritori yang suci dalam pendidikan, yaitu kebijakan pendidikan. Yang sejatinya, menurut penulis, konsep ini sangat mengagungkan humanisasi dalam proses pendidikan, yaitu membawa rahmat bagi semua fitrah peserta didik. Tentunya, konsep ini berkemungkinan kontradiktif dengan konsep pendidikan Islam yang lumrah terjadi di tubuh sebagian lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi pada kepentingan-kepentingan ideologis kelompoknya. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk menelaah lebih lanjut kebenaran teori-teori yang diformulasikan oleh Apple¹⁸, Giroux¹⁹, Foucault²⁰, dan Bourdieu²¹ mengenai relasi power dan pendidikan. Kesimpulan mereka mengenai relasi tersebut adalah bahwa fungsi-fungsi hegemonik digulirkan dalam proses pendidikan untuk membangun sebuah dominasi politik dan salah satu alat pendidikan yang mampu merealisasi tujuan itu adalah kurikulum.

Adapun, mengenai penerapan teori-teori tersebut ke dalam analisis kajian ini tentunya akan diadaptasikan secara interpretatif sesuai perspektif ranah yang dijadikan objek kajiannya. Jika analogi yang dikonstruksi oleh teori-teori mereka adalah korelasi kekuasaan dan pendidikan dalam konsep kontestasi politik dan perekonomian, maka menurut penulis analogi terhadap teori serupa dapat diaplikasikan dalam relasi ideologi keagamaan dan institusi pendidikan Islam di Indonesia berkaitan dengan kontestasi pengaruh idealisme sebuah kelompok. Adapun kesamaan faktor objektif di antara dua analogi ini adalah kepentingan-kepentingan. Asas kepentingan

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', Jakarta: Gramedia, 2008.

¹⁸ Michael Apple and Michael W Apple, *Ideology and Curriculum* (Routledge, 2018).

¹⁹ Henry A Giroux, 'Theory and Resistance in Education-A Pedagogy for the Opposition. South Hadley, Massachusetts: Bergin and Garvey Publishers' (Inc, 1983).

²⁰ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (Vintage, 1980).

²¹ John B Thompson and George Wolf, 'Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power', *Integrative Physiological and Behavioral Science*, 32.1 (1997), 101-2.

dalam aktivitas politik dapat dilihat dengan jelas dari sebuah institusi yang membawahnya²². Kekuasaan dan ideologi sudah tentu memiliki unsur-unsur politik untuk membentuk suatu patronage. Kepentingan ini selanjutnya dapat menjadi positif maupun negatif, positif bagi kelompoknya dan mungkin saja negatif bagi kelompok lain. Bias politik inilah yang memungkinkan sebuah persaingan dalam sektarianisme semakin menguat. Hal ini tentu tidak diinginkan jika terjadi dalam sebuah proses pendidikan. Seyogyanya, perbedaan sebisa mungkin tidak dipresentasikan dalam kegiatan pendidikan. Sesuai dengan pengertian pendidikan demokratis menurut Malik Fadjar, bahwa pendidikan perlu dikemas dalam watak multikultural, ramah menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama²³.

Perspektif penulis dalam pandangan ini sudah tentu tidak bermaksud menunjukkan sebuah penegasian terhadap keberadaan politik ke-ormas-an dan agenda-agenda kepolitikannya. Kritik pedagogis yang menjadi acuan dasar pemikiran penulis dalam hipotesis ini bertujuan memformulasikan bentuk pendidikan agama yang demokratis, sudah tentu tanpa mereduksi nilai-nilai ajaran yang menjadi keyakinan kelompoknya.

Cara untuk membangun kesadaran kritis tersebut tiada lain adalah dengan mengkritik praktik pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, dialog dan keterlibatan mendalam dalam praktik sosial adalah sebagai pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengasah nalar kritis dan sensitivitas sosial²⁴. Tanpa nalar kritis dan sensitivitas sosial tersebut, akan relatif sulit untuk mengetahui dan menyadari praktik hegemoni dan ideologisasi. Oleh karena itu, upaya mengkritik secara kritis praktik pendidikan tersebut dapat disebut sebagai upaya dari pendekatan kritis dalam melawan hegemoni ideologis. Bertolak belakang dengan kondisi ini, menurut penulis, jika dianalogikan dengan pendapat Freire tentang “pendidikan yang membebaskan”, maka interpretasi yang muncul terkait realitas pendidikan Islam di Indonesia yang notabene berlatar belakang ideologi keagamaan,

²² Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (LKIS PELANGI AKSARA, 2012), 1.

²³ Rekonstruksi Pendidikan Islam Muhaimin, ‘Dari Paradigma Pengembangan’, *Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

²⁴ McLaren and Leonard.

adalah bahwa pendidikan yang membebaskan berarti pendidikan yang mengakomodasi sistem pembelajaran tentang ajaran dan praktik dari kepercayaan/ideologi keagamaan lain. Pandangan ini sebenarnya bukan tanpa dasar, para ahli pendidikan telah membahas secara intensif tentang isu ini. Salah satunya, M. Khalid Mas'ud dalam "Religious Identity and Mass Education"²⁵, menyebutkan bahwa pendidikan massal dalam masyarakat muslim belum beralih kepada pendidikan yang pluralis. Menurutnya, pluralisme dan sikap saling memahami tidak dapat dicapai dengan sistem pendidikan yang terisolasi, melainkan diperoleh dengan pendidikan agama yang komprehensif yang mengembangkan sistem pembelajaran tentang ajaran dan praktik dari kepercayaan individu lain. Berdasarkan keterangan ini, makna pluralis di sini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas, melainkan memberi akses yang sama dalam pemberian materi keagamaan.

Realita ini perlu dianalisis lebih lanjut mengenai keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, khususnya yang berafiliasi pada ormas keagamaan tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat ada-tidaknya pengaruh relasi bias politik terhadap lembaga pendidikannya. Di mana, paradigma yang berkembang, relasi politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, ada 'symbiosis mutualisme' yang melingkupi keduanya. Meskipun begitu, perlu ditegaskan dalam kasus ini mengenai reposisi fungsi lembaga pendidikan sebagai *wisdom of education*. Apakah sekolah sebagai pusat indoktrinasi? Ataukah sekolah sebagai pusat edukasi masyarakat? Tentunya pertanyaan ini membutuhkan analisis mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Sehingga penting untuk melihat apa motivasi didirikannya sebuah lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada ormas keagamaan? Apa implikasi politis dalam hal ini? Dan apa pengaruhnya bagi sebuah lembaga pendidikan?

Salah satu isu besar dalam globalisasi adalah problem pluralisme pada penerapan pendidikan. Jika sering dalam keseharian kita mendengar pendidikan multikultural atau yang paling baru wacana *multi-faith education*²⁶, pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui

²⁵ Muhammad Khalid Masud, 'Religious Identity and Mass Education1', in *Islam in the Era of Globalization* (Routledge, 2005), pp. 182–91.

²⁶ Azyumardi Azra, 'Multi-faith Education' dalam *Resonansi*, Republika, edisi Kamis, 17 Februari 2005, 12.

penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras²⁷. Maka pada dasarnya pemikiran tersebut berakar pada problematika pluralitas yang ada pada masyarakat. Paradigma pendidikan pluralis setidaknya berkontribusi dalam mengubah pandangan akan keragaman, yang sebaiknya berbagai ragam ajaran keagamaan menjadi akses publik (pendidikan), sehingga tidak lagi muncul ke permukaan sebuah terminologi sistem pembelajaran agama yang monolitik atau eksklusif dalam pendidikan Islam.

Riset berkenaan dengan masalah relasi politik, agama dan pendidikan bukan sedikit dibahas dalam sebuah studi yang intens. Fuad Fachruddin melalui hasil penelitiannya, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*²⁸ menjelaskan secara lebih detail pergulatan kelembagaan maupun individu di dalam Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi proses demokratisasi, serta persepsi publik terhadap demokrasi dan segala isu turunannya. Karya ini menyumbangkan gambaran nyata dari perdebatan internal kedua organisasi itu, baik pada tingkat konsepsi maupun operasional. Buku ini sangat membantu penulis dalam melakukan studi lebih lanjut tentang proses transisi menuju demokrasi di Indonesia, dan bagi peminat kajian relasi Islam dan negara di Indonesia.

Zul Asyri LA dalam “Nahdlatul Ulama: Studi tentang Faham Keagamaan dan Pelestariannya melalui Lembaga Pendidikan Pesantren²⁹”, bahwa pesantren, yang merupakan ‘saudara kembar’ NU sekaligus sebagai lokomotif penghasil intelektual-intelektual NU, merupakan tempat khusus bagi NU untuk melestarikan faham keagamaan seperti Asy’ariyah. Adapun kurikulum dan materi pelajaran Fiqih di pesantren mengajarkan faham mazhab Syafi’i dan generasi ulama para pendukungnya.

Bertolak belakang dengan kesimpulan Zul, Mahrus As’ad dalam

²⁷ Saeful Malik, ‘Implementasi Manajemen Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren Al Muqoddas Tukmudal Sumber Kabupaten Cirebon’, *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2.1 (2020), 128–48.

²⁸ Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama* (Pustaka Alvabet, 2006).

²⁹ Asyri La.

“Pembaharuan Pendidikan NU”³⁰ menegaskan bahwa pembaruan pendidikan NU melalui madrasah dan pendekatan adaptif-gradualnya serta pengembangan budaya “terobosan” oleh para Kyai, NU memperkenalkan model-model penyelenggaraan madrasah modern yang di dalamnya sekaligus dimasukkan konsep-konsep dan prinsip baru di bidang pendidikan. Dan yang paling krusial yakni terkait pembaruan teologi pendidikannya yakni diperkenalkannya konsep “manusia dinamis” menggantikan konsep manusia fatalis. Melalui konsep-konsep baru ini, NU mengupayakan pelurusan kembali orientasi penyelenggaraan pendidikannya, baik dalam konten kurikulum dan proses pembelajaran maupun dalam pembenahan organisasi-manajemennya.

Sebagai komparasi guna melihat latar belakang sosial politik keberadaan institusi-institusi pendidikan Islam di Indonesia, disertai Arief Subhan yang berjudul “Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas”³¹, ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam telah mengalami perubahan dan pertumbuhan yang sangat besar dengan keragaman bentuknya berikut ideologi-keagamaan yang berada di balik eksistensinya. Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan kompleksitas lembaga pendidikan di Indonesia dan juga indikasi keragaman ideologi-keagamaan. Kesamaan konsep pendidikan, menurut Subhan, tidak menentukan kesamaan ideologi-keagamaan. Menurutnya, sekolah-sekolah Islam plus Quran yang berkembang selama ini memiliki ideologi-keagamaan sendiri sesuai dengan preferensi yang mereka pilih. Karya Subhan ini sangat membantu bagi peneliti dalam melakukan follow-up terhadap konsep-konsep pendidikan Islam modern terkini. Signifikansinya terletak pada kesimpulan Subhan mengenai eksklusivisme dalam lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi pada ormas-ormas Islam. Bagi penulis, pemetaan ideologi keagamaan berfungsi untuk melihat tingkat eksklusivisme lembaga pendidikannya, sehingga dapat membantu analisis penulis mengenai pengaruh dan implikasi sebuah ideologi dalam institusi

³⁰ Mahrus As’ad, ‘Pembaharuan Pendidikan Nahdlatul Ulama’ (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

³¹ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20* (Kencana, 2012).

pendidikan.

Nurhayati Djamas dalam *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*³² . memberikan gambaran menarik tentang perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim politik dan kebijakan negara. Nurhayati berusaha mengelaborasi keberadaan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh mulai dari tubuh organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga perkembangan sekolah umum. Perubahan dan reformasi pendidikan juga dipengaruhi oleh transmisi pemikiran keislaman, baik ideologi maupun aliran pemikiran organisasi keagamaan yang membentuk mainstream keagamaan di Indonesia. Berdirinya sekolah-sekolah seperti Insan Cendekia dan Madania dapat dikategorikan sebagai ‘varian baru’, meskipun pada dasarnya telah berdiri pula sekolah-sekolah elit pendahulunya seperti Al-Azhar. Secara implisit, perkembangan jenis pendidikan ini adalah suatu counter-ideology yang netral terhadap organisasi keagamaan yang berkembang di Indonesia, dalam arti lain sekolah-sekolah Islam unggulan ini mengusung ide integrasi terhadap perbedaan ideologi keislaman sebagaimana berkembang dewasa ini.

Berbeda kesimpulan dengan lainnya, salah satu peneliti Islam di Indonesia, antropolog Robert William Hefner dengan hasil risetnya, “*Making Modern Muslim: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*”,³³ menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara (cakupan penelitiannya di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Kamboja), terkhusus di Indonesia, mengalami kebangkitan. Hal ini, menurut analisisnya, ditandai dengan keinginan besar untuk menyatukan visi dengan pendidikan umum, adanya keterbukaan intelektualnya, dan keterkaitan dengan cita-cita demokrasi dan pluralisme. Berdasarkan data yang ia peroleh, mengenai idealisme para tenaga pendidik muslim, menunjukkan bahwa pemerintahan demokratis merupakan pilihan idealisme mereka. Menurutnya, hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mewakili pendidikan yang demokratis. Selain itu ia juga menyebutkan dalam tulisannya mengenai kemunculan sekolah Islam terpadu

³² Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pascakemerdekaan* (Rajawali Pers, 2009).

³³ Robert W Hefner, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (University of Hawaii Press, 2009).

yang berasosiasi pada jaringan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerakan Hidayatullah terutama setelah runtuhnya rezim Soeharto (awal tahun 2000-an). Kemunculan bentuk sekolah Islam ini, menurutnya, tidak semua diidentikkan dengan bentuk sekolah aktivis/pengkaderan. Masih oleh Hefner, dalam *Schooling Islam: Modern Muslim Education*,³⁴ dideskripsikan perkembangan kontemporer lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Islam seperti India, Maroko, Turki, Indonesia, Mali dan Inggris, secara umum digambarkan bahwa empat sudut pendekatan tentang modernitas di tubuh madrasah dan pendidikan Islam, yaitu: tumbuh dan berkembangnya ragam madrasah dan institusi pendidikan Islam lainnya; transformasi madrasah dan pendidikan tinggi Islam di bawah pengaruh perkembangan sosial dan intelektual modern; upaya pemerintah untuk mereformasi pendidikan Islam; dan dunia Islam dan masa depan pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi dan pluralisasi.

Karya serupa yang mungkin dapat dijadikan review komparatif tentang hubungan lembaga pendidikan tinggi di luar negeri (Amerika) dengan politik dapat dilihat dalam pembahasan *Closed Minds; Politics and Ideology in American Universities*³⁵. Data-data yang diperoleh Bruce dkk. dalam penelitiannya menunjukkan anti-tesis tentang dominasi politik dalam institusi pendidikan. Mereka menjelaskan bahwa dinamika hubungan politik dan ideologi di pendidikan tinggi Amerika menunjukkan kebalikan dari stigma populer yang berkembang, politik mendapatkan sedikit tempat di perguruan tinggi Amerika. Hal ini sekaligus mengubah suatu pandangan tentang bias politik yang selama ini membentuk orientasi mereka menjadi bentuk lembaga yang terlalu kiri/liberal. Sebagai penguat bukti, penelitian mereka menunjukkan bahwa kebanyakan perguruan tinggi di Amerika justru telah meninggalkan dunia perpolitikan. Bias politik, khususnya di perguruan tinggi negeri di sana, sangat jarang ditemukan. Kebanyakan mereka yang berideologi konservatif (baik dosen maupun mahasiswa) percaya bahwa ideologi hanya berimbas kecil atau tidak membuat karier dan pangkat dalam pekerjaan mereka menjadi lebih baik. Pendidikan di perguruan tinggi Amerika mengarah ke dalam bentuk sistem pendidikan yang sistematis,

³⁴ Robert W Hefner and Muhammad Qasim Zaman, *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* (Princeton University Press, 2010), xxxvii.

³⁵ Bruce L R Smith, Jeremy D Mayer, and A Lee Fritschler, *Closed Minds?: Politics and Ideology in American Universities* (Brookings Institution Press, 2010).

tidak memihak, dan tanpa pengaruh partai. Keterlibatan mereka ke dalam politik praktis, terutama ke politik kepartaian cenderung dihindari.

Untuk melihat relasi ideologi yang tersirat dalam sebuah kurikulum terhadap konsep pengajaran agama yang holistik, penulis merasa perlu melihat relevansi kajian Robert Jackson dalam *Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Religious Diversity and Pedagogy*. Ia mengaji tentang bagaimana merespons pluralitas di sekolah pada umumnya terutama berkaitan dengan masalah keagamaan. Menurutnya, perbedaan-perbedaan yang mungkin ditemukan dalam kajian-kajian keagamaan di kelas lebih dapat diatasi dengan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dengan kerangka kerja yang menghimpun nilai-nilai demokratis dalam menghormati perbedaan dan mengarahkan siswa pada posisi keberagamaannya, sehingga pendidikan agama dapat berperan dalam memediasi isu-isu kohesi sosial³⁶. Berkaitan dengan tema pluralisme dan keterkaitannya dengan Pendidikan Agama Islam, deskripsi kritis dari Muhammad Khalid Mas'ud dalam "Religious Identity and Mass Education"³⁷, mengungkapkan kesimpulan yang sedikit provokatif mengenai pluralisme dalam pendidikan pada umumnya, terutama pandangannya mengenai pendidikan agama. Dalam argumentasinya, ia menyitir tentang aspek pengajaran pendidikan agama yang kurang terbuka dan terkesan eksklusif. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa sikap saling memahami tidak dapat dicapai dengan sistem pendidikan yang terisolasi, melainkan diperoleh dengan pendidikan agama yang komprehensif yang mengembangkan sistem pembelajaran tentang ajaran dan praktik dari kepercayaan individu lain. Kesimpulan ini membantu penulis dalam meramu hipotesis dalam penelitian ini. Diskursus pluralisme berkaitan dengan identitas sangat relevan dengan kajian peneliti guna mencari kesimpulan yang representatif terhadap studi ideologi dan problem-problem mendasar dalam pendidikan agama. L. Philip Barnes dalam "The Misrepresentation of Religion in Modern British (Religious) Education", menyatakan bahwa isi dari kurikulum pendidikan agama secara partikular

³⁶ Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy* (Psychology Press, 2004).

³⁷ Masud.

belum bisa dianggap berhasil dalam memfasilitasi pengetahuan dan pemahaman agama; atau dalam mengembangkan respek nilai-nilai toleransi terhadap ras, budaya dan keagamaan yang berbeda-beda.³⁸

KESIMPULAN

Pendidikan sebagai faktor utama perkembangan budaya masyarakat, seringkali dimanfaatkan oleh berbagai pemikiran dan ideologi untuk menyebarkan pemahaman dan pola pikirnya. Sudah tidak asing lagi jika suatu pemikiran mendominasi lembaga atau sistem pendidikan tertentu. Di antara pemikiran-pemikiran yang banyak memberikan pengaruh dan bahkan menentukan tujuan dan metode pembelajaran suatu sistem pendidikan adalah ideologi dan agama.

Hubungan antara pendidikan dan ideologi sudah mengakar dalam perjalanan sejarah dunia pendidikan. Dominasi suatu ideologi tidak hanya didapatkan melalui revolusi atau kekerasan yang dilakukan oleh institusi-institusi negara, tetapi juga dapat melalui institusi-institusi lain, seperti institusi agama, pendidikan, media massa dan keluarga. Dan menjadi jelaslah bahwa hakikat pendidikan sangat tergantung dari kaca mata ideologi yang dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, *Madrasah Nizamiyah Studi tentang Hubungan Pendidikan dan Politik* (Tesis Magister Ilmu Agama Islam, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1994)
- Apple, Michael, and Michael W Apple, *Ideology and Curriculum* (Routledge, 2018)
- Apple, Michael W, 'Apple, Michael W.," On Analyzing New Hegemonic Relations: An Interview," Pp. 173-202 in Michael W. Apple. *Ideology and Curriculum*, New York: RoutledgeFalmer, 2004.', 2004
- , 'The Politics of Official Knowledge: Does a National Curriculum Make Sense?', *Discourse*, 14.1 (1993), 1–16
- Arjmand, Reza, 'Education and Empowerment of Religious Elite in Iran', *Educational Strategies among Muslims in the Context of Globalization:*

³⁸ L Philip Barnes, 'Developing a New Post-liberal Paradigm for British Religious Education', *Journal of Beliefs & Values*, 28.1 (2007), 17–32.

- Some National Case Studies*, 2004, 285
- As'ad, Mahrus, 'Pembaharuan Pendidikan Nahdlatul Ulama' (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007)
- Asyri La, Zul, 'Nahdlatul Ulama: Studi Tentang Faham Keagamaan Dan Kelestariannya Melalui Lembaga Pendidikan Pesantren'
- Azyumardi Azra, *Multi-faith Education" dalam Resonansi* (Republika, 2005)
- Bernstein, Basil, *Pedagogy, Symbolic Control, and Identity: Theory, Research, Critique* (Rowman & Littlefield, 2000), v
- Bosworth, C E, 'The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. By George Makdisi. Pp. Xiv, 377. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981.£ 20.', *Journal of the Royal Asiatic Society*, 115.2 (1983), 304–5
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pascakemerdekaan* (Rajawali Pers, 2009)
- Fachruddin, Fuad, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama* (Pustaka Alvabet, 2006)
- Fadjar, A Malik, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas* (Diterbitkan atas kerja sama Yasmin [dan] Penerbit Mizan, 1998)
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (LKIS PELANGI AKSARA, 2012), I
- Foucault, Michel, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (Vintage, 1980)
- Freire, Paulo, 'Pedagogy of the Oppressed (Revised)', *New York: Continuum*, 1996
- Giroux, Henry A, 'Theory and Resistance in Education-A Pedagogy for the Opposition. South Hadley, Massachusetts: Bergin and Garvey Publishers' (Inc, 1983)
- Hefner, Robert W, *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (University of Hawaii Press, 2009)
- Hefner, Robert W, and Muhammad Qasim Zaman, *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* (Princeton University Press, 2010), xxxvii
- Jackson, Robert, *Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy* (Psychology Press, 2004)
- Malik, Saeful, 'Implementasi Manajemen Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren Al Muqoddas Tukmudal Sumber Kabupaten Cirebon', *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2.1 (2020), 128–48
- Masud, Muhammad Khalid, 'Religious Identity and Mass Education1', in *Islam in the Era of Globalization* (Routledge, 2005), pp. 182–91

- McChesney, Robert D, ‘Marshall GS Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. In Three Volumes: The Classical Age of Islam; The Expansion of Islam in the Middle Periods; The Gunpowder Empires and Modern Times (Chicago: University of Chicago Press, 1974). \$20.00 per Volume.’, *Review of Middle East Studies*, 9.3 (1975), 45–47
- McLaren, Peter, and P Leonard, ‘Critical Literacy, Resistance and the Politics of Memory’, *Paulo Freire: A Critical Encounter*, 1993, 47–89
- Mehran, Golnar, ‘Ideology and Education in the Islamic Republic of Iran’, *Compare*, 20.1 (1990), 53–65
- , ‘Religious Education and Identity Formation in Iranian Schools’, in *Conference on Constructs of Inclusion and Exclusion: Religion and Identity-Formation in Middle Eastern School Curricula*, November, 2003, pp. 14–15
- Mochtar, Affandi, ‘Pola Dan Model Perubahan Pesantren’, *Eduprof: Islamic Education Journal*, 1.1 (2019), 87–94
- Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, ‘Dari Paradigma Pengembangan’, *Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Nasional, Departemen Pendidikan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’, Jakarta: Gramedia, 2008
- Philip Barnes, L, ‘Developing a New Post-liberal Paradigm for British Religious Education’, *Journal of Beliefs & Values*, 28.1 (2007), 17–32
- Romly, M, ‘SEJARAH MADRASAH DAN PERKEMBANGANNYA’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.01 (2012)
- Sirozi, Muhammad, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (RajaGrafindo Persada, 2005)
- Smith, Bruce L R, Jeremy D Mayer, and A Lee Fritschler, *Closed Minds?: Politics and Ideology in American Universities* (Brookings Institution Press, 2010)
- Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20* (Kencana, 2012)
- Thompson, John B, and George Wolf, ‘Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power’, *Integrative Physiological and Behavioral Science*, 32.1 (1997), 101–2